



**BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH**

JALANMERDEKANO46NABIRE

Kontak:(0984)22350;

Email:bpp.papteng@gmail.com

Website : <https://badanpengarahpapua.go.id/>

Nomor : 06/VI/2026/BPP.PT
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kegiatan BPP Bulan Juni

KepadaYth,
Anggota BPP Papua Tengah
Di -
Nabire

Surat Pengantar

1. Berdasar:
 - a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Papua
 - b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 Tentang OTK BPP Sesuai Pasal 2 Dan 3 Tugas Dan Fungsi BP3OKP.
2. Berikut Ini Kami Menyampaikan Laporan Kegiatan Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Tengah Bulan Juni 2026.

Demikian Kami Sampaikan Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan banyak terimakasih.

Nabire 30 juni 2026
Anggota Kelompok Kerja BP3OKP
Provinsi Papua Tengah

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
(BP3OKP)
SEKRETARIAT
BP3OKP NABIRE
IRJEN. POL (P) DRS. PIETRUS WAINE, S.H., M.HUM





BP3OKP



LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA TENGAH BULAN JUNI 2026

30 Juni 2026



Anggota BPP Dan Pokja Papua Cerdas Melakukan Kunjungan Ke Sekolah Berpola Asrama, 3 Juni 2026 di Timika Papua.



Lokus Penerima Dana Asrama Papua Tengah Tahun 2025

No	Kab/Asrama	Siswa	Total Dana Bantuan
Nabire			
01	Asrama Yaro (SD N Muko Tanah Merah)	68	680.000.000
02	Asrama Putri Marganingsih Nabire	28	280.000.000
03	Asrama Putra/I sma yppk Adhi Luhur Nabire	77	770.000.000
04	Asrama Putra/I SMA Unggulan Meepago	67	670.000.000
05	Asrama Putra Kristus Sahabat Kita Nabire	20	200.000.000
Timika			
01	Sekolah Berpola Asrama Arastamar Timika	84	840.000.000
02	Asrama Katolik Bintang JEJORA (smp yppk Kokonao)	98	980.000.000
Paniai			
01	Asrama STP Kebo	97	970.000.000
Deiyai			
01	Asrama St.Yohanes Permenadi Wage	35	350.000.000
02	Asrama SMPTK YPPGI Gakokebo	78	780.000.000
03	Asrama SMTK YPPGI Doble Waghete	40	400.000.000
04	Asrama STK Touyepapa Deiyai	28	280.000.000
Intan Jaya			
01	Asrama ST.Missel Bilogai	102	1.020.000.000
02	Penginapan SMAN 1 Sugapa	12	120.000.000
Dogiyai			
01	Asrama Putra/I St.Fransiskus Asisi Moanemani	69	690.000.000

**JUMLAH ASRAMA
15 ASRAMA**

**JUMLAH SISWA
903 ANAK**

**JUMLAH BANTUAN DANA
Rp.9.030.000.000**

Monitoring dan Evaluasi Asrama

- BP3OKP Papua Tengah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi di beberapa Asrama Penerima Bantuan Dana Pengelola Asrama oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026
- Lokus monev penerima dana asrama Adalah kabupaten Timika, Nabire, Dogiyai,Deiyai,Paniai dan Intan Jaya
- Bantuan Dana Asrama sangat membantu siswa, ke depan perlu ada penguatan kapasitas pengelola asrama

Tujuan Monev

- Mengevaluasi Pemanfaatan Bantuan Dana Asrama bagi Pengelola Asrama
- Memastikan dampak dari Bantuan Dana Asrama bagi pengelola dan anak-anak asrama
- Memastikan keaktifan, kegiatan, tata Kelola dan kondisi asrama sebagai penerima bantuan dan asrama
- Memastikan kapasitas pengelola asrama dan jumlah penghuni asrama
- Merekomendasikan keberlanjutan pengelolaan asrama kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah

Anggota Pokja Papua Sehat Mewakili Anggota BPP Menghadiri Penyambutan Kunjungan Kerja Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Rabu, 03 Juni 2026 Bertempat Di Bandara Nabire



• Maksud

- Maksud kehadiran Anggota Pokja Papua Sehat yang mewakili BPP adalah:
- Sebagai bentuk **representasi resmi** Badan Pengarah dalam menyambut kunjungan kerja Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI.
- Menunjukkan **dukungan dan sinergi kelembagaan** antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di wilayah Papua.
- Menjalin **komunikasi dan koordinasi awal** terkait program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Tujuan

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- Membangun **hubungan kerja sama yang baik** antara BPP dan Kementerian Pekerjaan Umum.
- Mendukung **kelancaran agenda kunjungan kerja** Wakil Menteri selama berada di Nabire.
- Menyampaikan secara langsung **kondisi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan di Papua**, khususnya yang berkaitan dengan sektor kesehatan dan infrastruktur.
- Mendorong **percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus)** melalui kolaborasi lintas sektor.



Kepala BP3OKP Papua Tengah memberikan materi pengelolaan BOSDA SMP se Papua tengah dalam rangka pengawasan dana OTSUS tahun anggaran 2026. Timika, 4 Juni 2026

- Dalam pemaparannya, Anggota BPP menekankan beberapa hal penting, antara lain:
1. Pentingnya tata kelola keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Peran pengawasan internal dan eksternal dalam mencegah penyimpangan penggunaan dana;
 3. Penguatan kapasitas pengelola BOSDA di sekolah agar mampu menyusun perencanaan dan laporan pertanggungjawaban dengan baik;
 4. Sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga pengawas dalam memastikan efektivitas program BOSDA.



Kesimpulan:

1. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BOSDA semakin memahami peran dan tanggung jawabnya, serta berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan yang optimal demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata.
2. peserta bosda dilatih untuk meminimalisir penyimpangan dalam menyusun program berbasis anggaran dan terwujudnya hasil yang maksimal.
3. Dengan adanya kegiatan ini peserta mahir menggunakan dashboard.



Pokja papua Sehat mewakili Anggota BPP menjadi Narasumber pengelolaan BOSDA SMP se-Papua tengah dalam rangka pengawasan dana OTSUS tahun anggaran 2026. Timika, 4 Juni 2026

Kegiatan Bosda Tahun 2026

- Pendampingan Penyusunan ARKAS BOSDA dilaksanakan di Timika, Nabire dan Paniai
- Waktu Pelaksanaan mulai dari Tanggal 3- 14 Juni 2026

Materi Kepala BP3OKP Papua Tengah

Mengapa BP3OKP Perlu terlibat dalam kegiatan penyusunan ARKAS BOSDA Se Papua Tengah?

- Sesuai perpres no 121 tahun 2022, BPP mempunyai tugas melaksanakan SEHEK percepatan Pembangunan dan pelaksanaan OTSUS Papua.
- BPP juga berpersan penting dalam kerangka perencanaan dan penganggaran Pembangunan papua, termasuk dalam apengelolaan ARKAS BOSDA
- BPP juga berperan penting dalam pengelolaan tata Kelola OTSUS termasuk tata Kelola keuangan diantaranya dana BOSDA yang bersumber dari dana OTSUS
- BP3OKP junya mempunyai tugas untuk menerima laporan penggunaan dana OTSUS termasuk laporan BOSDA yang bersumber dari OTSUS
- BP3OKP juga mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana OTSUS yang diperuntukkan untuk BOSDA
- Menekankan pada penggunaan sesuai ARKAS yang disusun
- Menekankan pa pelaporan tepat waktu

Penerima Bantuan BOSDA Tahun 2026

Satuan Pendidikan (Negeri dan Swasta)	Jlh Siswa
SLB	488
SMP	32.033
SMA	13.902
SMK	11.396
Asrama	1.101
Jumlah	58.920

Total Dana BOSDA Tahun 2026

Rp.77.841.200.000



Pemanfaatan BOSDA

Dana BOSDA diperuntukkan guna membebaskan komponen pembiayaan yang dibebankan kepada siswa dalam bentuk biaya sekolah (sekolah gratis) bagia satuan pendidikan SLB,SMP,SMA dan SMK se Provinsi Papua Tengah yang tersebar di 8 Kabupaten sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah

Tujuan Program Sekolah Gratis

- Pendidikan bermutu untuk semua. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh siswa tanpa diskriminasi
- Pemerataan Akses Pendidikan. Mengurangi kesenjangan social dan ekonomi serta memperluas akses pendidikan
- Peningkatan kualitas SDM. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara regional dan global
- Percepatan penuntasan ATS. Mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke satuan pendidikan agar memperoleh hak pendidikan yang setara
- Peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS). Mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan lebih lama sehingga meningkatkan kualitas pendidikan daerah
- Peningkatan harapan lama sekolah (HRS). Merperluas kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

POKJA PAPUA SEHAT MEMBERIKAN BIMBINGAN AKREDITASI KEPADA POKJA HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK), KAB. DEIYAI 8 JUNI 2026

- Memberikan bimbingan Akreditasi kepada Pokja HPK(Hak Pasien dan Keluarga) yaitu:
1. Menyiapkan Dokumen panduan, kebijakan, Elemen penilaian HPK.
 2. Menjelaskan tata cara penyusunan dokumen sampai Wawancara.
 3. Menjelaskan Standar Prosedur Operasional HPK4. Dokumem bukti fisik dari hasil.

Hak dan Kewajiban Pasien dan Keluarga
Penghormatan terhadap Agama, Keyakinan, dan Nilai Pribadi Pasien
Privasi dan Kerahasiaan Informasi Pasien
Perlindungan dan Penyimpanan Barang Milik Pasien
Perlindungan Pasien dari Kekerasan dan Penelantaran
Partisipasi Pasien dan Keluarga dalam Pelayanan
Informasi tentang Kondisi, Diagnosis, dan Rencana Asuhan
Informasi Kompetensi PPA dan Penjelasan Tindakan
Hak Menolak atau Menghentikan Pengobatan
Penolakan Resusitasi (DNR) dan Penghentian Bantuan Hidup
Hak Pasien terhadap Asesmen dan Manajemen Nyeri
Pelayanan Pasien Menjelang Akhir Kehidupan (End of Life Care)
Penanganan Keluhan, Konflik, dan Perbedaan Pendapat
Informasi Hak dan Kewajiban Pasien
Persetujuan Umum (General Consent)
Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)
Perlindungan Pasien dalam Penelitian Klinis
Informasi dan Persetujuan Partisipasi Penelitian
Hak Pasien dalam Penelitian/Uji Klinis

Dipindai dengan CamScanner



RAPAT KOORDINASI KERJA BERSAMA KETUA BGN KABUPATEN NABIRE, 10 JUNI 2026 DI SEKERTARIAT BPP PAPUA TENGAH

MAKSUD DAN TUJUAN

- Rapat koordinasi bersama Ketua BGN Papua Tengah dimaksudkan untuk memastikan perkembangan pelaksanaan Program MBG di Provinsi Papua Tengah.
- Tujuan rapat koordinasi untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan dan kebermanfaatn Program MBG bagi pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah.

REKOMENDAS I

- 1.Badan MBG Menyiapkan data base Petani Asli Papua sebagai calon supplier dan pembagian jadwal dalam menyuplai bahan baku di beberapa dapur MBG.
- 2.Pembinaan berkelanjutan kepada petani orang asli Papua dimana BP3OKP bertindak sebagai pengawas dan pengarah percepatan pembangunan ekonomi Papua sehingga perlu dilakukan kolaborasi terstruktur di berbagai OPD teknis dan stakeholder lainnya. Harapannya kelompok tani calon penyuplai bahan baku dapat konsisten dan produksi terus berkelanjutan.

RENCANA TINDAK LANJUT (rtl)

- 1.Kunjungan kerja BP3OKP dalam hal ini Pokja Papua Produktif ke beberapa lokasi dapur MBG dalam rangka monitoring dan evaluasi.
- 2.Rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Provinsi Papua Tengah dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Ketua BGN dengan agenda persiapan kelompok tani produktif sebagai calon supplier bagi Dapur MBG di Kabupaten Nabire.
- 3.Pokja Produktif akan melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke lembaga penyedia keuangan / perbankan terutama Bank Pembangunan Daerah Papua dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan petani supplier MBG.
- 4.BP3OKP terlibat dalam penjadwalan audiensi kelompok anak muda Papua yang telah mendesain website Siap-MBG dengan Wakil Presiden RI.



KOORDINASI KERJA POKJA PRODUKTIF BERSAMA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA TENGAH 17 Juni 2026

HASIL YANG DICAPAI

1. Adanya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap program kerja pada Dinas bersangkutan dengan fungsi kerja Pokja Produktif.
2. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Provinsi Papua Tengah.
3. Adanya rapat koordinasi kerja yang akan diselenggarakan oleh BP3OKP untuk menindaklanjuti kendala yang dihadapi melalui paparan program kerja dari Dinas terkait untuk meningkatkan percepatan pelaksanaan program kerja.

maksud & TUJUAN

- Maksud : Koordinasi bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah dimaksudkan mengetahui untuk program kerja pada masing-masing bidang pada th.2026.
- Tujuan : Rapat koordinasi untuk mengetahui perkembangan program yang dilaksanakan dan langkah-langkah strategis dalam percepatan pembangunan ekonomi produktif melalui program kerja dinas terkait.



RAPAT TERBATAS BP3OKP DENGAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA TENGAH TERKAIT JAWABAN ATAS PERMINTAAN HASIL AUDIT TATA KELOLA DANA OTSUS TAHUN 2025, 17 Juni 2026

- **MAKSUD DAN TUJUAN:** Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026 bertempat di Kantor KPPN Nabire di ruangan BP3OKP Provinsi Papua Tengah yang dihadiri oleh Anggota BP3OKP Provinsi Papua Tengah Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Pietrus Waine, S.H., M.Hum, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah Krisno Wandu Siahaan, Ibu Risma, Bapak Joko dan Bapak Yung Bi sebagai perwakilan dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah. **Laporan kerja sama ini disusun untuk mendokumentasikan pelaksanaan sinergi interinstitusional antara BPKP dan BP3OKP, dengan fokus utama pada penyampaian jawaban dan pemaparan BPKP atas permintaan BP3OKP terhadap hasil audit tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Buku 2025**

- Berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah Nomor: PE.08.03/S-811/PW/PW36/3/2026 terkait jawaban atas Permintaan Hasil Audit Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Tahun 2025 Provinsi Papua Tengah tanggal 17 Juni 2026 dan Lampirannya hasil yang diperoleh Adalah:
- Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah telah melakukan pengawasan pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan batasan tanggung jawab bahwa hasil pengawasan BPKP didasarkan pada Data, Informasi, dan fakta yang disampaikan kepada BPKP oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan Pemerintah Kabupaten Mimika dan/atau Pihak Lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:

Hasil pengawasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil pengawasan pada pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabira dan Kabupaten Mimika yang diuraikan secara dalam 7 tahap yaitu: tahap alokasi, tahap perencanaan dan penganggaran, tahap penyaluran, tahap penggunaan/pemanfaatan, tahap pelaporan, tahap pengawasan dan rekomendasi;
2. **Penguatan Fungsi Masing-Masing Lembaga (Win-Win Solution):**
 - ❑ Bagi BP3OKP: Hasil audit dan resume eksekutif dari BPKP memberikan basis data pengawasan (*audit evidence*) yang objektif dan valid. Hal ini sangat membantu BP3OKP dalam memetakan area kritis, mengurai sumbatan (bottlenecking), serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran kepada Presiden/Wakil Presiden dan instansi terkait.
 - ❑ Bagi BPKP: Kolaborasi ini memperluas dampak pemanfaatan hasil pengawasan (*utilization of audit findings*). Rekomendasi perbaikan yang diterbitkan BPKP mendapatkan daya dorong politis dan strategis yang lebih kuat dari BP3OKP untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Tengah.



POKJA PAPUA POLHUKAM MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PENYERAHAN LHP BPK RI ATAS LKPD PEMERINTAH DAERAH PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025, 19 JUNI 2026

• MAKSUD DAN TUJUAN:

- Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Tengah merupakan instrumen konstitusional penting untuk mengukur kinerja dan kepatuhan Pemerintah Provinsi terhadap peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Undangan DPR Provinsi Papua Tengah tertanggal **19 Juni 2026**, BP3OKP diundang secara resmi untuk menghadiri dan mengawal jalannya Rapat Paripurna tersebut.

• KESIMPULAN :

- Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendapatkan Opini WDP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Terdapat beberapa catatan strategis yang disampaikan oleh BPK terkait:
 - Pengendalian Intern (SPI) yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan aset daerah.
 - Kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa / realisasi belanja bansos-hibah terutama di penggunaan dana reses dewan.



SHEK POKJA POLHUKAM DENGAN PT. PLN (PERSERO) UP2K Papua Tengah 19 JUNI 2026



• Maksud:

- Melakukan sinkronisasi, penyelarasan, dan mediasi terkait program perluasan jaringan listrik baru PT PLN (Persero) UP2K Papua Tengah dengan kebijakan PEMDA Kabupaten serta pemangku kepentingan adat di Papua Tengah.

• Tujuan:

- Mengidentifikasi secara detail kendala fisik, status regulasi lahan, dan hambatan birokrasi dalam pemasangan jaringan listrik baru.
- Mengurai tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antar-instansi daerah (Dinas Tata Ruang, ATR/BPN, dan Dinas Kehutanan).
- Merumuskan rekomendasi taktis dan rencana tindak lanjut bersama demi percepatan elektrifikasi yang merata.

KESIMPULAN:

Pelaksanaan program pemasangan jaringan listrik baru oleh PT PLN (Persero) ULP Papua Tengah tidak mengalami hambatan berarti pada aspek teknis, melainkan pada aspek non-teknis. Masalah utamanya adalah belum tersedianya hak lintas (**right of way**) akibat status tanah hak ulayat dan kawasan hutan, yang diperparah oleh koordinasi birokrasi Pemda Kabupaten (Dinas Tata Ruang, ATR/BPN, Kehutanan) yang berjalan terpisah-pisah karena perbedaan tupoksi dan batasan kewenangan masing-masing

SARAN:

1. **Fasilitasi Mediasi oleh BP3OKP:** Mendorong BP3OKP Papua Tengah untuk menginisiasi pertemuan tripartit berkala guna menjembatani komunikasi, mengurai kebuntuan birokrasi, dan menyinkronkan tupoksi instansi Pemda terkait secara paralel.
2. **Pembentukan Tim Terpadu Sektoral:** Mendorong Pemda baik di Provinsi dan Kabupaten membentuk Tim Gugus Tugas Terpadu (**Task Force**) lintas sektor (PLN, BP3OKP, Dinas Teknis) agar proses perizinan tata ruang, sertifikasi lahan, dan izin kawasan hutan dapat diproses lewat satu pintu.

LAPORAN PERJALANAN DINAS PENGUKUHAN DAN PEMBEKALAN ANGGOTA POKJA BPP REKRUTMEN 2026, 22 juni 2026

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut:

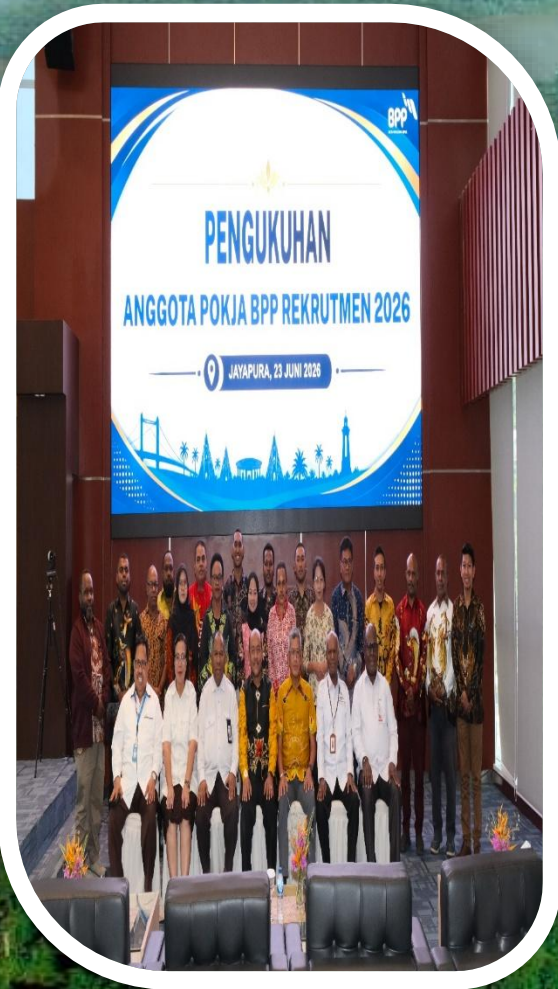
- 1.Seluruh Anggota Pokja BP3OKP telah dikukuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.Peserta memperoleh pemahaman mengenai tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja masing-masing Pokja.
- 3.Terbangun kesamaan persepsi dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 4.Terjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar Pokja serta dengan Sekretariat BP3OKP.
- 5.Tersusun komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan BP3OKP.

MAKSUD

Melaksanakan pengukuhan dan pembekalan kepada anggota Pokja BP3OKP agar memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

TUJUAN

- 1.Mengukuhkan Anggota Pokja BP3OKP secara resmi.
- 2.Memberikan pembekalan mengenai tugas pokok dan fungsi Pokja.
- 3.Meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota Pokja.
- 4.Memperkuat koordinasi dan sinergi antar Pokja dalam pelaksanaan program kerja.
- 5.Menyusun komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.



Anggota BPP dan pokja Papua cerdas menghadiri undangan Dinas pendidikan provinsi dalam Acara Pembukaan cerdas cermat tingkat provinsi papua tengah, 26 Juni 2026

Anggota BPP PPT

1. Terlaksananya pembukaan kegiatan dengan baik dan lancar.

2. Terbangnya semangat kompetisi dan motivasi belajar bagi pelajar

3. Terjalinnya koordinasi dan sinergi antara BPP dan instansi pendidikan

4. Meningkatkan perhatian terhadap pengembangan pendidikan di papua tengah

Dalam kegiatan tersebut, Anggota BPP Papua Tengah turut hadir dan memberikan dukungan moril terhadap penyelenggaraan kegiatan. Kehadiran BPP menjadi wujud komitmen dalam mendorong peningkatan kualitas SDM Papua melalui sektor pendidikan.



Rapat SHEK BP3OKP Pokja papua sehat dengan mahasiswa profesi dokter muda papua tengah, 17 Juni 2026



Rapat SHEK BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan mahasiswa profesi dokter, dokter baru yang akan Intershift dan dokter yang sudah selesai Intershift pada tanggal 18 Agustus 2026.

Pembahasan:

1. Penempatan Intershift bagi dokter Asal Papua Tengah yang telah lulus profesi agar ditempatkan Rumah Sakit di Papua Tengah **secara praktik dapat menggunakan dokter intershift/locum** antara lain :
 - RSUD Timika – Rumah Sakit rujukan terbesar di Mimika dengan volume pasien tinggi.
 - Mitra Masyarakat Hospital – rumah sakit swasta besar dengan layanan spesialis cukup lengkap.
 - RSUD Nabire – rumah sakit rujukan penting di Papua Tengah dengan kapasitas tempat tidur yang cukup besar dan layanan spesialis yang berkembang.
 - RSUD Paniai – rumah sakit rujukan wilayah Meepago yang melayani beberapa kabupaten sekitar.
 - RS Kasih Herlina Timika – rumah sakit swasta yang juga dapat menjadi opsi untuk kerja sama dokter non-organik.
2. Bagi mahasiswa profesi dokter yang **RENIM** (perpanjangan masa studi atau registrasi kembali mahasiswa yang telah melewati masa studi normal tetapi masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan kampus) yang belum lulus Uji Kompetensi, Dikti sudah mengaktifkan dan memberikan kesempatan kekhususan bagi wilayah Papua agar dapat melaksanakan uji kompetensi. Saat ini, masih menunggu info koordinasi pihak kampus, Dikti dan Pemerintah melalui Panitia Nasional Uji Kompetensi (UKMPPD/UKDI), bekerja sama dengan institusi pendidikan kedokteran dan organisasi profesi dokter untuk menetapkan waktu mengadakan Ujian Kompetensi Khusus wilayah Papua.
3. Bagi dokter yang sudah selesai intershift, dimohon koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk penempatan di wilayah Papua Tengah baik di Rumah Sakit atau Puskesmas yang sedang membutuhkan tenaga dokter.

Tindaklanjut :

- Rekomendasi pihak terkait mengenai penempatan dokter yang baru lulus uji kompetensi yang berasal dari Provinsi Papua Tengah untuk dapat shift intershift di Rumah Sakit Wilayah Papua Tengah.

Rapat SHEK BP3OKP Pokja Papua Sehat Dengan Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Bidang SDM Provinsi Papua Tengah, 14 Juni 2026

- Rapat SHEK BP3OKP dengan Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Bidang SDM terkait:
1. RENIM Mahasiswa Profesi Dokter.
 2. Penempatan Intrensift bagi Dokter Lulus Uji Kompetensi
 3. Penganggaran Klaim Ko Harus Sehat.
 4. Pembahasan Kasus Nakes di Timika



A photograph of two birds perched on a tree branch. The larger bird on the left has a yellow head, a bright green throat, brown wings, and a long, flowing white tail. The smaller bird on the right is entirely brown. The background is a soft-focus green forest. The text "Terima Kasih" is written in large, bold, yellow letters across the middle of the image.

Terima Kasih